

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGHADAPI DEMOKRASI ERA DIGITAL DI KANTOR LURAH KOTA LAHAT

Eka Tri Kinanti¹, Nurlia Muslimah²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

044031581@ecampus.ut.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Era digital telah memainkan peran sentral dalam memperluas dan memperdalam keterlibatan warga negara dalam siklus pembuatan kebijakan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena global pesatnya transformasi digital yang meresap ke sektor kebijakan publik dan administrasi pemerintahan, khususnya di tingkat lokal seperti kantor lurah Gunung Gajah kota lahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk transformasi kebijakan publik digital yang diterapkan di kantor lurah kota lahat dalam merespons tuntutan demokrasi era digital. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa demokrasi era digital sangat berpengaruh terhadap transformasi dalam proses pengambilan kebijakan publik di kantor lurah kota lahat. Transformasi ini memengaruhi kebijakan dalam masyarakat dengan menyediakan berbagai informasi yang lebih mudah, membuat ruang diskusi dan

menyediakan akses apirasi, meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, mengatasi tantangan kesenjangan digital (sebagai risiko yang perlu diatasi), dan mencegah penyebaran informasi palsu (sebagai risiko yang perlu diatasi). Dengan adanya platform online, kemudahan akses informasi, dan kemampuan untuk berinteraksi menjadi lebih mudah.

Kata Kunci: Demokrasi Era Digital; Kebijakan Publik; Transformasi

ABSTRACT

The digital era has played a central role in broadening and deepening citizen engagement in the policymaking cycle. This research is motivated by the global phenomenon of rapid digital transformation that has permeated the public policy and government administration sectors, particularly at the local level, such as the Gunung Gajah sub-district office in Lahat City. The purpose of this study is to identify and describe the forms of digital public policy transformation implemented at the Lahat sub-district office in response to the demands of digital-era democracy. The research employed a qualitative descriptive approach, collecting data through interviews and document studies. The data analysis technique employed an interactive analysis model. The research findings indicate that digital-era democracy has significantly transformed the public policymaking process at the Lahat sub-district office. This transformation influences policymaking within the community by providing more accessible information, creating spaces for discussion and providing access to aspirations, increasing engagement in the decision-making process, addressing the challenge of the digital divide (as a risk that needs to be addressed), and

*Corresponding author

E-mail addresses: 044031581@ecampus.ut.ac.id

preventing the spread of misinformation (as a risk that needs to be addressed). The existence of online platforms facilitates easy access to information and the ability to interact.

Keywords: Digital-Era Democracy; Public Policy; Transformation

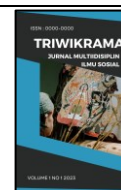
1. PENDAHULUAN

Ketika sebuah instansi mulai memakai teknologi digital, maka hal dapat ini mengubah cara kerja, perubahan ini memengaruhi inti, alur, dan hasil dari kebijakan publik. Dalam kesehariannya kemajuan digital sudah berhasil menyatukan pemerintah dan warga, atau masih terdapat kendala-kendala seperti warga yang kurang paham teknologi, kekhawatiran soal data, dan layanan yang belum menjangkau semua orang. Penelitian ini dianggap penting karena bertujuan menganalisis dampak transformasi digital secara langsung pada tingkat pemerintahan paling bawah. Kota Lahat, sebagai garda terdepan pelayanan publik, berada di persimpangan jalan antara mempertahankan tradisi birokrasi atau mengadopsi inovasi digital. Transformasi kebijakan publik di sini tidak hanya berarti mengganti formulir kertas dengan formulir digital, melainkan juga merombak filosofi pembuatan dan implementasi kebijakan agar lebih responsi terhadap *input* dan *feedback* warga yang difasilitasi oleh platform digital. Kegagalan dalam bertransformasi dapat mengakibatkan disrupsi layanan, memburuknya kualitas demokrasi lokal, dan meningkatnya ketidakpercayaan publik.

Konsep pemerintahan dalam menggunakan elektronik sering menjadi kendala utama bagi masyarakat. Namun, pemerintah berangsur melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, sehingga penggunaan digital dapat melampaui optimalisasi bergerak menuju pemerintahan digital yang berfokus pada ekosistem data, kolaborasi, dan desain layanan yang berpusat pada pengguna. Kumorotomo, (2022) mengemukakan "Pergeseran dari *e-Government* ke pemerintahan digital bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan perancangan ulang mendasar dari logika layanan publik, bergerak dari operasi yang terkotak-kotak dan berpusat pada proses menuju ekosistem kebijakan yang saling terhubung, digerakkan oleh data, dan berpusat pada pengguna. Transformasi ini secara inheren mendefinisikan ulang instrumen kebijakan publik dan dampaknya pada tingkat lokal." Kutipan ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan perubahan struktural dan filosofis yang memengaruhi inti dari kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan mengaplikasikan kerangka berpikir tersebut untuk mengkaji pengalaman spesifik di Kantor Lurah Kota Lahat. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana bentuk transformasi kebijakan publik di Kantor Lurah Kota Lahat dalam merespons tuntutan demokrasi era digital?

Pengelolaan teknologi digital untuk meningkatkan dan mendukung administrasi sebagai konsep yang menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Transformasi digital dalam pemerintahan bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat kelayanan publik dan memperkuat interaksi antara pemerintah dan warga negara (Shafira & Kurniasiwati, 2021). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan diatur oleh berbagai undang-undang yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyusunan peraturan daerah. Ini menegaskan bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang mencerminkan keinginan masyarakat. Menurut Alaslan, dkk. (2023) kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Transformasi kebijakan melibatkan perubahan mendasar dalam tujuan, instrumen, dan proses kebijakan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks digital, transformasi ini difokuskan pada pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Perkembangan tersebut telah membentuk metode baru dalam Demokrasi dan Transformasi Digital. Sejak munculnya konsep *digital government* (pemerintahan digital), arah tata kelola telah mengalami perubahan, dari yang sebelumnya berfokus pada regulasi dan pengawasan, kemudian berkembang melalui transaksi, layanan, interaksi, dan kepuasan, hingga kini menekankan pada kolaborasi dan partisipasi. Jadi berdasarkan uraian di atas transformasi kebijakan publik dalam menghadapi demokrasi era digital telah membawa dampak terhadap perubahan mendasar bagi



seluruh aspek kehidupan, termasuk ruang lingkup demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nasution, (2020) yang mengatakan bahwa “perubahan kebijakan public karena era digital mempengaruhi semua bagian kehidupan”

Pengelolaan teknologi digital menjadi kunci dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Karena tujuannya untuk memperkuat pelayanan dimasyarakat mendorong keterlibatan warga dalam membuat kebijakan, sejalan dengan tujuan yang disepakati oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru yang memungkinkan partisipasi publik semakin meningkat di setiap tahap proses demokrasi. Transformasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital telah menyediakan lebih banyak *platform* yang beragam untuk meningkatkan partisipasi pada masyarakat dalam dinamika politik dan pembuatan keputusan. Melalui penggunaan *platform* digital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan demikian, esensi dari transformasi digital layanan publik bukan hanya terletak pada efisiensi penyampaian layanan, tetapi pada perwujudan *good governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan hukum. Walaupun kerangka regulasi telah membuka ruang partisipasi publik, tantangan optimalisasi teknologi dan inklusivitas akses tetap menjadi isu krusial.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu penelitian gambaran kompleks, membuat deskripsi melalui kata-kata, laporan dilakukan secara terperinci dari hasil wawancara dan pengamatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2020). Moelong dalam Agustini, dkk. (2023) menjelaskan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau yang disampaikan secara lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2020) menyatakan bahwa metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil dari sebuah penelitian. Instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, yang memerlukan interaksi langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada tiga orang narasumber, yaitu Lurah bapak Rohman, SE, sekretaris lurah bapak Rahmad, SE dan Kasi Sosial dan pemberdayaan masyarakat bapak Asmamam Wijaya, M.Ap. Adapun pedoman yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman pertanyaan dalam wawancara

No	Pertanyaan	Topik Pertanyaan	Narasumber
1	Bagaimana bapak memaknai demokrasi digital dalam konteks pemerintah ditingkat kelurahan saat ini?	Pemahaman konteks dan kebijakan	Lurah
2	Bagaimana penerapan keempat prinsip tata kelola berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan pada hukum. Menurut bapak?	Pemahaman konteks dan kebijakan	Lurah
3	Bagaimana proses transisi dari pelayanan manual ke digital di kantor lurah ini? Apakah ada resistensi di awal?	Pemahaman konteks dan kebijakan	Sekretaris Lurah

*Corresponding author

E-mail addresses: 044031581@ecampus.ut.ac.id



No	Pertanyaan	Topik Pertanyaan	Narasumber
4	Aplikasi atau platform digital apa saja yang saat ini aktif digunakan untuk pelayanan publik?	Implementasi dan Infrastruktur	Kasi Sosial dan pemberdayaan masyarakat

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati dan menganalisa dokumen. Analisis data dilakukan selama proses penelitian dengan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Sugiyono (2020) dalam Suardi (2023) menjelaskan bahwa analisis data menggunakan metode ini dilakukan dengan berbagai langkah yaitu data *collection* (hasil pengumpulan data), data *reduction* (meringkas data yang penting), data display (menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian, naratif, tabel, dan lain- lain), dan penarikan kesimpulan berdasarkan ketiga tahapan sebelumnya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan public di era digital hadir untuk memberikan gambaran tentang adanya perkembangan digital yang akan mempengaruhi kebijakan yang ada dalam masyarakat. Perubahan secara menyeluruh dalam masyarakat dapat memicu krisis yang Panjang. Perubahan kebijakan ini mempengaruhi masalah kompleks bidang ekonomi, politik, social, lingkungan dan teknis semuanya memiliki peran yang berpengaruh pada masyarakat. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pemerintah dalam menyediakan layanan yang baik kepada masyarakat dengan lebih efiisien, efektif, responsif, dan berfokus sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil Penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk transformasi kebijakan publik digital yang diterapkan di kantor lurah Gunung Gajah kota Lahat dalam merespons tuntutan demokrasi era digital. Data diperoleh melalui wawancara dengan lurah, sekretaris dan kasi sosial dan pemberdayaan masyarakat keluarahan Gunung Gajah kabupaten Lahat. Selain wawancara data juga didapat dengan cara mempelajari dokumentasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital pada masyarakat telah banyak mengalami transformasi mendasar dari arena fisik menuju ranah digital yang ditopang oleh platform-platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs user-generated content. Transformasi ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana transformasi kebijakan publik dalam menghadapi demokrasi era digital di kantor lurah Gunung Gajah kota Lahat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Rohman, SE selaku lurah Gunung Gajah kabupaten Lahat, pada saat wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 13 November 2025. Mengenai cara memaknai pemanfaatan teknologi informasi digital dan komunikasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat

"Ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagi saya, teknologi informasi itu ibarat Jalan Tol Digital, merupakan demokrasi digital bukan sekadar mengganti mesin ketik dengan komputer atau menaruh formulir di website. Maknanya jauh lebih dalam, yaitu pergeseran paradigma pelayanan dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik". Kamis, 13 November 2025



**Gambar 1. Wawancara dengan lurah
Gunung Gajah Kab. Lahat bapak Rohman, SE**

Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 1 dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan kebermanfaatan pada masyarakat dapat dilakukan dengan kerja sama-sama, menyediakan informasi yang relevan, dan melibatkan warga, yaitu dengan kemajuan teknologi digital yang semakin luas, pemerintah juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan pemerintahan digital. Pemanfaatan digital disebut *good government* yang melibatkan empat prinsip utama Busan Partnership for Effective Development/UNDP. Untuk melihat pemerintahan digital yang baik biasa disebut dengan tata kelola pemerintah, yang mencakup empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan pada hukum. Hal ini didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur yang baik dan sistematis di kantor lurah Gunung Gajah. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur yang baik maka pelayanan publik semakin baik, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rohman dan Hanafi (2022) yang mengatakan selain keramahan pemberi layanan yang profesional berdasarkan prosedur juga membuat masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan. Hal ini juga dapat meminimalisir munculnya masalah ketika proses pemberian layanan sedang berlangsung. Selanjutnya masih isi wawancara dengan lurah, mengenai penerapan konkret keempat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam operasional digital sehari-hari di kelurahan.

"Baik, pertanyaan bagus. Prinsip tanpa aksi itu hanya slogan. Dalam transformasi digital di kelurahan kami, keempat prinsip tersebut kami 'bumikan' menjadi sistem kerja nyata. Kami menerapkan Open Dashboard di website kelurahan. Warga bisa melihat pagu anggaran pembangunan selokan, jadwal penyaluran bansos, hingga syarat administrasi secara gamblang. Jika warga mengajukan surat, sistem kami transparan memperlihatkan posisi dokumen. Apakah masih diverifikasi RT, sedang diperiksa Kasi, atau sudah ditandatangani Lurah. Tidak ada lagi istilah 'berkas nyangkut' tanpa kejelasan." Kamis, 13 November 2025



**Gambar 2. Wawancara dengan lurah
Gunung Gajah Kab. Lahat bapak Rohman, SE**

Hasil wawancara yang dilakukan merefleksikan transformasi birokrasi yang progresif, di mana teknologi digital dimanfaatkan bukan sekadar sebagai alat bantu, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memanifestasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan hukum secara nyata dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa' et al. (2023) yang mengungkapkan melalui implementasi Open Dashboard untuk keterbukaan data anggaran serta sistem pelacakan dokumen yang terintegrasi, pihak kelurahan berhasil mengonversi konsep abstrak Good Governance menjadi mekanisme kerja operasional yang terukur, sehingga efektif menghilangkan ketidakpastian birokrasi (berkas nyangkut), menjamin kepastian layanan bagi warga, dan memaksa aparaturnya untuk bekerja secara akuntabel di bawah pengawasan publik yang terbuka.

Untuk kelengkapan data peneliti juga melakukan wawancara pada sekretaris lurah, yaitu bapak Rahmad, SE. dan Kasi Sosial dan pemberdayaan masyarakat bapak Asmamam Wijaya, M.Ap pada kantor lurah. Berikut hasil wawancara bersama sekretaris mengenai proses transisi dari pelayanan manual ke digital di kantor lurah.

"Proses transisi dari pelayanan manual ke digital dilakukan dengan cara mensosialisasikan prinsip tata kelola pemerintahan menjadi sistem kerja nyata, di mana prosedur manual yang rawan ketidakjelasan diubah menjadi sistem digital terintegrasi seperti Open Dashboard dan pelacakan dokumen yang menjamin transparansi data serta kepastian posisi berkas secara nyata." Kamis, 13 November 2025



**Gambar 3. Wawancara dengan sekretaris lurah
Gunung Gajah Kab. Lahat. bapak Rahmad, SE**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris lurah Gunung Gajah Kab. Lahat bapak Rahmad, SE. dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterbukaan penting untuk melibatkan semua pihak yang ingin memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang menggunakan pemanfaatan internet/digital dan platform online yang mendorong interaksi, dan aplikasi seluler yang memperluas akses, mempermudah individu untuk mendapatkan informasi dan wawasan dalam bidang politik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Rohman, (2024), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada pemanfaatan internet sangat berpengaruh pada kebijakan pemerintah untuk masyarakat, karena masyarakat merupakan tulang punggung dari sebuah system pemerintahan, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat adalah tulang punggung dari sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berfungsi dengan baik. Dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi peran penting partisipasi politik masyarakat dalam sistem pemerintahan demokratis serta bagaimana partisipasi ini memengaruhi pembangunan negara dan kehidupan demokratis.

Wawancara terakhir dilakukan kepada bapan Asmamam Wijaya, M.Ap selaku Kasi Sosial dan pemberdayaan masyarakat, mengenai aplikasi atau platform digital apa saja yang saat ini aktif digunakan untuk pelayanan public. Diperoleh data sebagai berikut :

“Untuk mengoptimalkan layanan publik, Kantor Lurah Gunung Gajah menerapkan sistem digital terintegrasi meliputi perizinan (OSS), pengaduan (LAPOR! & SP4N), pengadaan (LPSE), dan pemerintahan elektronik (SPBE)”.



Gambar 4. Wawancara dengan Kasi Sosial dan pemberdayaan masyarakat Kab. Lahat. bapak Asmamam Wijaya, M.Ap

Berdasarkan hasil data yang diperoleh layanan berbasis teknologi atau *platform* untuk meningkatkan manfaat/efisiensi dan keterbukaan pada kantor lurah gunung Gajah dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan dan memproses perizinan secara *online* untuk mempermudah urusan administrasi/birokrasi.
- 2) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). merupakan platform pengaduan secara online yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan terkait proses pelayanan public yang tidak efektif.
- 3) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), merupakan system yang memiliki inisatif untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait ketidakpuasan pelayanan pada pemerintah terkait.
- 4) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sebuah *platform* untuk mengawasi pengadaan barang sebagai fasilitas umum tepat sasaran.
- 5) Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pada program pemerintah.

Platform yang digunakan di Kantor Lurah Kota Lahat di atas, merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan, keterbukaan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa transformasi di era digital telah dimanfaatkan dengan baik di Kantor Lurah Gunung Gajah Kota Lahat. Dengan tujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Rafael, Gamaliel, & Korompis, (2024) dalam jurnal ilmiahnya menegaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan. Penerapan platform digital di tingkat kecamatan/kelurahan terbukti menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka.



Penggunaan platform yang digunakan pada pemerintah sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena platform ini menawarkan berbagai kemudahan untuk mengakses berbagai keperluan masyarakat. Akses yang mudah dan jelas serta transparan merupakan kunci utama untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih besar dan luas. Dengan kebijakan menggunakan tata kelola pelayanan digital pada pemerintah telah membangun kepercayaan masyarakat melalui Platform yang sudah dilakukan. Secara keseluruhan, kebijakan publik menciptakan responsif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Shafira & Kurniaswi, (2021) yang menegaskan bahwa partisipasi public bukan hanya formalitas melainkan pendukung kemudahan pelayanan untuk masyarakat yang mencerminkan pelayanan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.

Teknologi mempermudah masyarakat untuk ikut serta dalam diskusi politik dan memberikan suara mereka. Dengan menggunakan platform online, orang bisa menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Ini menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Tantangan kesenjangan digital. Walaupun teknologi memberikan banyak kesempatan, ada tantangan seperti kesenjangan digital yang perlu diatasi. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi, yang bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi. Karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Dan Meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya teknologi, masyarakat bisa lebih mudah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Secara umum, teknologi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses transformasi kebijakan publik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti bahas mengenai “Transformasi kebijakan publik dalam menghadapi demokrasi era digital di kantor lurah kota Lahat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi digital telah berdampak besar pada cara masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan. Dengan adanya *platform online*, kemudahan akses informasi, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pemimpin politik, individu kini dapat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Meski ada banyak manfaatnya, tantangan dan risiko tetap harus diatasi agar partisipasi masyarakat di era digital benar-benar dapat berkontribusi pada kebijakan publik.
2. Transformasi ini memengaruhi kebijakan publik dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah, memfasilitasi diskusi dan aspirasi public, meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, mengatasi tantangan kesenjangan digital (sebagai risiko yang perlu diatasi), dan mencegah penyebaran informasi palsu (sebagai risiko yang perlu diatasi).
3. Inisiatif *digital government* yang telah diterapkan meliputi berbagai *platform* dan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan serta memfasilitasi partisipasi publik diantaranya adalah Sistem Layanan Perizinan Terpadu Elektronik (*Online Single Submission - OSS*), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (*LAPOR!*), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (*SP4N*). Implikasi *digital government* melalui pemanfaatan teknologi yang dapat mempengaruhi partisipasi publik berupa akses



informasi yang lebih mudah, memfasilitasi diskusi dan suara publik, tantangan kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, serta meningkatkan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Saran

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan pada karya ilmiah ini, maka pada bab penutup peneliti mengemukakan saran-saran sesuai dengan hasil pengamatan dalam pembahasan. Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneiliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Platform Digital Interaktif: Kantor Lurah Gunung Gajah kota Lahat perlu mengembangkan atau mengoptimalkan *platform digital* yang lebih interaktif (tidak hanya informatif) untuk memfasilitasi diskusi, penyampaian aspirasi, dan *e-participation* yang terstruktur dalam siklus pembuatan kebijakan.
2. Sebaiknya platform yang akan digunakan harus *user-friendly* dan responsif.
3. Menerapkan sistem yang memastikan setiap aspirasi atau masukan publik yang masuk melalui kanal digital ditindaklanjuti dan diberikan umpan balik yang transparan kepada warga dalam jangka waktu yang jelas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F.A., Akbar, J.S., Lubis, M.A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M.S., Tuerah, P.R., Rahmadhani, M.V., & Rulanggi, R. (2023), *Metode penelitian kualitatif (Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif)*. Medan: Mifandi Mandiri Digital.
- Alaslan, A., Bormasa, M. F., & Rijal, S. (2023). *Kebijakan publik: Teori, formulasi dan aplikasi*. Surabaya : Get Press.
- Kumorotomo, W. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, Z. (2020). *Transformasi Digital dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 15-30.
- Nisa', F., Supriyono, B., & Nuh, M. (2023). *Inovasi pelayanan publik berbasis e-government (Studi kasus aplikasi kelurahan online di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1878-1884.
- Rafael, K., Gamaliel, H., & Korompis, C. W. M. (2024). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 19(1), 52-63. <https://doi.org/10.35794/gc.v19i3.56785>
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153-160. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Rohman, N. (2024). *Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Lampung : Wira Buana
- Shafira, A., & Kurniasiwi, A. (2021). Konsep dan Implementasi Digital Government: Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 52-68
- Suardi. (2023). *Metode penelitian kualitatif: teori dan praktik*. Serang: AA Rizky.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.